

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.

Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 2008.

Bagir Manan, dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung. Alumni. 1997.

_____, *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta. FH UII Press. 2006. Asri

Wijayant, *Strategi Penulisan Hukum*, CV. Lubuk Agung, Bandung. 2011. Ellydar

Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta. 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.

_____, *Perihal Undang-Undang*, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.

_____, dan M. Ali Safa"at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.

C.S.T Kansil, *Kedudukan dan Ketetapan MPR*, Jakarta. Pradnya Paramita. 1980

Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta. 2007.

- Moh. Mafud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta. LP3ES. 2007.
- M. Syamsudin, *Operasionalitas Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2012.
- Sri Soemantri M, *Ketetapan MPR(S) sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Bandung, CV Remajda Karya.1985.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. 2006.
- Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. 2001.
- Materi Sosialisasi Putusan Maejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekertaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Bahan Tanyangan Materi Sosialisasi Putusan Maejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekertaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(pasca amandemen)

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan
Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai
Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di
Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis
Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-leninisme.

Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam
Rangka Demokrasi Ekonomi.

Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan
Ampera.

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Websites

http://id.wikipedia.org/wiki/Ketetapan_Majelis_Permusyawaratan_Rakyat, diakses pada tanggal 07 Februari 2012 pukul 11.10 WIB.

http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 01 maret 2012 pukul 04.45 WIB.

<http://syukriy.wordpress.com/2011/10/20/tap-mpr-dihidupkan-kembali/>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2012 pukul 12.00 WIB.

Tesis

Martha Riananda, *Politik Hukum dan Kedudukan Ketetapan MAJelis Permusyawaratan Rakyat Di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, Tesis, MH Unila, Lampung, 2012.

Skripsi

Tantri Wibisono, *Kedudukan Hukum Ketetapan MPR/MPRS dalam Sistem Hukum Indonesia Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi , FH Unila, Lampung, 2009.